

## **Penerapan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”.**

**ABDUL MUID<sup>1</sup>,KASTUR,<sup>2</sup>**

### **Abstraksi:**

Dewasa ini wacana pendidikan nasional melahirkan inovasi pendidikan yang lebih menekankan pada pengelolaan sistem pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pesantren merupakan salah satu contoh dan model dari sistem pendidikan tersebut, dan dalam hal ini kita kenal istilah *community based education* (pendidikan berbasis masyarakat) sebagai sistem pendidikan yang lebih menekankan partisipasi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, konsep ini masih banyak mengalami problem dan kendala.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal: (1) Bagaimana pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik? Dan (2) Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diarahkan untuk menunjukkan fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai kondisi tertentu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Ketiganya dilakukan secara terencana untuk mendapatkan data yang lengkap dan relevan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui proses reduksi data, sajian data, verifikasi serta penarikan simpulan penelitian. Laporan penelitian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif secara rinci sebagaimana ruang lingkup pembahasan.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, (1) konsep pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya telah dimiliki dan dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin sebelum konsep itu sendiri dimunculkan. Hingga saat ini, Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin juga terus berupaya melaksanakan konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. (2) kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin lebih disebabkan oleh kendala yang bersifat internal, di samping kendala dari aspek masyarakat. Kendala internal dipengaruhi oleh kultur pesantren, pola manajemen madrasah, kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan informasi. Di samping itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam menunjang program-program pendidikan masih menjadi kendala tersendiri.

---

<sup>1</sup> **Dr.H. Abdul Muid,S.Ag.M.Pd.I** adalah Dosen dan Direktur Pascasarjana IAI Qomaruddin Bungah Gresik Jawa Timur, dosen STAI Arrosyid Surabaya, Ketua Dewan Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Maziyatul Ilmi Boboh Gresik, Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon NU Driyorejo Gresik, Anggota LAKPESDAM NU Gresik, Anggota KOMNASDIK Propinsi Jawa Timur, dan Wakil Ketua LPTNU Kabupaten Gresik Jawa Timur, Anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik Bidang Pendidikan, Pengurus MWCNU Kecamatan Menganti-Gresik,12-2017-2017-2022 **Pengurus Aswaja Center NU Kabupaten Gresik,2021-2026.,Pengurus DMI Kabupaten Gresik,Kabid Pendidikan,Teknologi dan Kebudayaan, masa Bakti 2022-2024.**

<sup>2</sup>Mahasiswa IAI Qomaruddin Bungah Gresik Jawa Timur Indonesia.

## Kata Kunci: Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat

### BAB I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan individu. Aktifitas pendidikan yang diwujudkan dalam lembaga pendidikan didirikan oleh masyarakat untuk melayani kepentingan mereka. Secara umum tujuan pendidikan dapat dibagi menjadi dua, terkait dengan kedudukan individu sebagai individu, individu sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang individu, ia diharapkan dapat mengembangkan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Adapun sebagai anggota masyarakat, ia diharapkan agar kelak ketika dewasa mampu bertingkah laku, berbuat dan hidup dengan baik sesuai dengan norma dan nilai masyarakat.<sup>3</sup>

Selain itu, hubungan antara pendidikan dan masyarakat dapat dilihat dari sifat pendidikan, yaitu: *pertama*, pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang baik. *Kedua*, pendidikan diarahkan untuk menyiapkan anak dalam menjalankan kehidupan di masyarakat; mengenai kewajiban, hak dan norma masyarakat. *Ketiga*, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Sebab pendidikan membutuhkan dukungan dari masyarakat, berupa penyediaan fasilitas, sistem sosial, budaya dan lain-lain.<sup>4</sup>

Dalam ajaran Islam, pendidikan -yang sering disebut *ta'lim*, *tarbiyah*, dan *ta'dib*-<sup>5</sup> memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dari pandangan di atas. Semua manusia –khususnya muslim- baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan mencari ilmu kapan saja dan dimana saja. Allah sangat mencela orang-orang yang bodoh, dan sebaliknya sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Selanjutnya orang-orang berilmu diwajibkan menyebarkan ilmunya kepada orang lain dan mengamalkannya demi kemaslahatan seluruh umat manusia.<sup>6</sup>

Era sekarang ini, sejalan dengan gelombang demokratisasi di dunia dan di Indonesia, rakyat semakin cerdas dan tahu terhadap hak-haknya. Mereka mulai menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk di bidang pendidikan. Demokratisasi hanya akan lahir dan berkembang jika rakyat diberdayakan dan masyarakat ikut serta di dalam memberdayakan dirinya sendiri.

---

<sup>3</sup> S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum* (Bandung: Jemars, 1990), 24

<sup>4</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengantar Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 17.

<sup>5</sup> Menurut al-Attas, walaupun ketiga istilah itu bisa digunakan dalam pengertian yang sama, sejumlah ahli berpendapat bahwa kata *ta'dib* inilah yang lebih tepat menggambarkan arti pendidikan. Sebab maknanya tidak terbatas pada pengajaran saja, namun juga tidak terlalu luas sampai meliputi pendidikan terhadap makhluk selain manusia. Lihat Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: al-Husna Zikra, 2000), 3-4.

<sup>6</sup> A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), 43.

Pesantren dan madrasah merupakan suatu sistem pendidikan yang lahir dan dibesarkan dalam suatu masyarakat. Pesantren dan madrasah telah lahir dari suatu sistem sosial tertentu, sehingga keberadaan pesantren sebenarnya dikelola oleh masyarakat yang dimilikinya. Meskipun di dalam perkembangannya pengelolaan pesantren banyak ditentukan oleh para kyai sebagai pemiliknya, namun tidak bisa disangkal bahwa kehidupan pesantren telah ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya.<sup>7</sup>

Terkait dengan peran serta masyarakat dalam menentukan arah pendidikan, maka dalam undang-undang system pendidikan nasional disebutkan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan social, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sementara itu dana penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemda dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Jika dewasa ini kita berbicara mengenai inovasi pendidikan nasional untuk melahirkan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat maka pesantren merupakan model atau bentuk dari pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Sudah tentu prinsip-prinsip manajemen modern perlu diterapkan di dalam pola pendidikan yang berdasarkan manajemen masyarakat. Pada akhirnya *Community Based Education* (Pendidikan Berbasis Masyarakat) menjadi salah satu alternatif pembenahan pendidikan dengan ditopang oleh pelaksanaan *School based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah).

Salah satunya adalah manajemen madrasah yang banyak dikembangkan oleh pesantren, pengelolaan lembaga pendidikan madrasah adalah otonom melalui implementasi aktivitas dan kreativitas pengelolanya baik pimpinan pesantren, kepala sekolah, maupun staf guru dalam melaksanakan misi sekolah. Tentunya hal ini dalam kerangka menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program-program kelembagaan. Baik *Community Based Education* (Pendidikan Berbasis Masyarakat) maupun *School Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah) menuntut adanya pandangan yang luas dari para pengelola serta menguasai teknik-teknik manajemen modern, termasuk manajemen sekolah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada Bab I pasal 1 ayat 16 yang dimaksud pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan agama, social, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>HAR. Tulaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 152-153.

<sup>8</sup> Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (Bandung : Citra Umbara, 2006), 104-105.

<sup>9</sup>Ibid. 74

Dari fenomena yang timbul di masyarakat, biasanya pendidikan pesantren mendapat respons yang berbeda-beda dari masyarakat. Di beberapa daerah barangkali keberadaan pesantren kurang didukung oleh partisipasi masyarakat. Sementara di daerah lain tidak jarang pendidikan pesantren menjadi alternatif pilihan orang tua dan siswa, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

Banyak siswa atau santri dan alumni yang datang serta belajar di pesantren itu, mereka tidak hanya datang dari desa sekitar tetapi mereka banyak yang datang dari luar Gresik, seperti Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, serta daerah-daerah lain di Jawa Timur. Dari Jawa Tengah misalnya mereka datang dari Kabupaten Demak, Grobogan, Rembang, selain itu tidak sedikit santri yang berasal dari Jakarta, Tangerang bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa.

Kondisi ini tentu merupakan fakta yang sangat menggembirakan, karena minat masyarakat terhadap pendidikan pondok pesantren dan madrasah yang *notabene* berkarakter Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community Based Education*) mulai dicari dan digandrungi masyarakat karena beberapa alasan, diantaranya masyarakat merasa memiliki keberadaan lembaga pendidikan pesantren ini, termasuk kurikulum yang diinginkan oleh masyarakat dipenuhi serta tidak keberatan memberikan dana untuk keperluan pendidikan tersebut khususnya di pesantren ini.

Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik menjadi sebuah Karya Penelitian yang berjudul “Penerapan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”.

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang permasalahan di atas mempunyai sejumlah tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui factor-faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pengembangan ilmu

Pentingnya penelitian ini yang berhubungan dengan pengembangan ilmu adalah bahwa hasil penelitian ini setelah disusun menjadi laporan, diharapkan dapat menambah teori-teori atau khasanah keilmuan mengenai penerapan *community based education* dan efektifitas pelaksanaan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Kemudian teori-teori tersebut

dapat menjadi bahan untuk diuji kebenarannya di kemudian hari seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Bagi masyarakat

Setelah penelitian ini usai, diharapkan hasilnya dapat memberi sumbangan moral atau spiritual bagi pengelola Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin khususnya, dan pengelola di madrasah atau di Pondok Pesantren lain pada umumnya, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama *out put*-nya seperti yang diharapkan masyarakat.

3. Bagi peneliti

Memperluas wacana dan khasanah keilmuan Islam terutama dalam bidang pengembangan pendidikan berbasis masyarakat serta pelaksanaannya di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

### C. Batasan Istilah

Penelitian yang berjudul “Penerapan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik” ini bermaksud meneliti bagaimana pelaksanaan model pendidikan berbasis masyarakat di lembaga pendidikan tersebut. Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian ini berikut dijelaskan kata kunci.

*Community Based Education* atau pendidikan berbasis masyarakat ialah pendidikan yang hidup dari, untuk dan oleh masyarakat. Masyarakat merasa memiliki pendidikannya dan oleh sebab itu diarahkan kepada pemenuhan akan kebutuhan kehidupan yang nyata dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan *Community Based Education* adalah sebuah pendidikan yang lahir dan dikelola oleh masyarakat, seperti pesantren dan madrasah. Sementara yang menjadi kajian Karya Penelitian ini adalah Madrasah Aliyah di lingkungan Pesantren, yakni Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, sampai saat ini tidak ada satupun penelitian baik dalam bentuk buku, skripsi, Karya Penelitian maupun disertasi yang meneliti tentang pendidikan berbasis masyarakat atau *Community Based Education* di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

Sejumlah peneliti memang telah dilakukan di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin ini seperti yang dilakukan oleh Ach. Mudlori, Muhammad, Suwarni, dan Mustofa, semua penelitiannya dalam bentuk penelitian skripsi. Dari penelitian-penelitian itu tidak satupun yang mengkaji tentang *Community Based Education*. Walaupun begitu terdapat studi yang mengkaji tentang manajemen berbasis sekolah atau *school based management* yang pada tataran awal memiliki kesamaan dalam proses pengelolaan pendidikan berdasarkan

kemampuan dan kewenangan lokal<sup>10</sup>, maka berarti harus diperhatikan kemampuan daerahnya. Penelitian School Based Management ini berbentuk Karya Penelitian IAIN Sunan Ampel yang memaparkan konsep *school-based management*;<sup>11</sup> karakteristik, strategi dan penerapannya di MIN Model Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Sementara penelitian tentang *Community Based Education* ini dilaksanakan di PP Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik yang lokasi dan kondisi daerahnya serta kajiannya berbeda.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Mustofa dilaksanakan di pesantren ini dimana penelitian Karya Penelitian ini dilakukan- namun kajian masalahnya berbeda, Mustofa meneliti tentang metode-metode mengajar Qowaid nahwu dan Sorf terhadap Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah di lingkungan pesantren itu,<sup>12</sup> ia berkesimpulan bahwa dengan metode yang dipakai di lembaga pengajaran Bahasa Arab relatif berhasil.

Adapun tentang konsep *community based education* sepengetahuan peneliti belum pernah diangkat dan diteliti. Namun konsep *community based education* sebenarnya sedikit disinggung oleh HAR Tilaar serta Gulam Farid Malik, oleh karena itu konsep ini dijadikan sebagai pengantar bagi penulis menuju kajian *Community Based Education* yang kemudian setelah Karya Penelitian ini selesai, ada manfaat untuk diterapkan di pendidikan khususnya pendidikan berbasis masyarakat di Madrasah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin tersebut.

## **BAB II. KONSEP PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT**

### **1. Konteks Sosial Lahirnya Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Dinamika kehidupan sosial-politik di Indonesia, terutama pasca reformasi 1998, membawa perubahan yang cukup signifikan pada seluruh dimensi kehidupan, khususnya lahirnya otonomi daerah. Arus desentralisasi berimplikasi pada pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal.

Reformasi yang cukup radikal di Indonesia telah menempatkan ruang sosial sebagai bagian penting dalam merumuskan dan menentukan kebijakan, terutama setelah lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah<sup>13</sup>. Ditetapkannya undang-undang tersebut, telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomikan. Pembedaan dimensi

---

<sup>10</sup> Gulam Farid Malik, *Pedoman Manajemen Madrasah*, (Yogyakarta: Kerjasama Basic Education Project BEP) Depag, ADB Lou Number 1442 INO dengan Forum Kajian Budaya dan Agama (FKBA), 2000)

<sup>11</sup> Mohammad Faizin, *Penerapan Konsep Scool Based Management MIN Unggulan/Model; Studi Kasus MIN Model Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan*, (Surabaya; Karya Penelitian IAIN SAS, 2003)

<sup>12</sup> Mustofa, *Thoriqoh Ta'lim Qowaidi al-Nahwi wa al-Sorfi Nahwa al-Lughoti al-Arabiyyah fi al-Madrasah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik*, (Gresik: Skripsi STIT Raden Santri, 2000)

<sup>13</sup> UU No. 22 tahun 1999 telah diamandemen (diganti) karena dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

desentralisasi dalam konteks administratif dan politik memang sulit dibedakan, namun yang penting dalam aspek pendidikan,

desentralisasi dianggap sebagai persoalan manajemen, karena itu keputusan dalam desentralisasi administratif apakah dapat dilaksanakan di luar departemen atau pemerintah secara keseluruhan, tanpa konsultasi yang ekstensif. Desentralisasi politik melibatkan beragam stakeholders, baik mereka yang berada di dalam maupun di luar pemerintah. Mereka semua mempunyai kepentingan untuk melindungi atau mencapainya.<sup>14</sup>

Berbarengan dengan laju desentralisasi dan otonomi daerah, paradigma pendidikan juga mengalami pergeseran. Desentralisasi dengan otonomi pendidikan menuntut proses pendidikan bertolak dari kebudayaan tempat proses pendidikan tersebut berlaku. Paradigma ini menuntut bentuk manajemen pendidikan baru, yaitu manajemen pendidikan yang menumbuhkembangkan sistem pendidikan yang berakar dari kebudayaan dalam suatu masyarakat yang kongkrit sebagai pemilikinya.<sup>15</sup>

Dimensi pengembangan pendidikan ini lebih merujuk pada kebutuhan dan peningkatan potensi masyarakat. Pendidikan memasuki era baru dengan semangat demokratis, karena undang-undang tersebut disambut oleh daerah dengan memberikan peluang pada lembaga pendidikan untuk mengembangkan *network* (jaringan) kerjasama dengan stakeholders pendidikan, dalam proses mengembangkan perencanaan lembaga pendidikan, pengembangan kurikulum, maupun berbagai bentuk kebijakan mendasar lainnya.<sup>16</sup>

Paradigma pendidikan harus memiliki relevansi dengan nilai-nilai masyarakat. Pendidikan yang berbasis masyarakat akan memungkinkan menjadi alternatif bagi terciptanya sumber daya manusia seutuhnya. Secara filosofis, pendidikan merupakan upaya pewarisan, penyempurnaan dan pengembangan ilmu, pengalaman, kebiasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sesuai norma, nilai hukum yang menjadi acuan dalam kebudayaan masyarakat.<sup>17</sup>

Pendidikan diupayakan untuk membekali peserta didik dengan kerangka yang memungkinkannya menyusun dan memahami pengetahuan yang diperoleh dari lingkungannya.<sup>18</sup> Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan berarti upaya terbaik untuk meraih kesempurnaan hidup manusia sesuai dengan realitas faktual yang ada di tengah kehidupan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Ibtisam Abu-Duhou, *Manajemen Berbasis Sekolah*, ter. Noryamin Aini & Suparto (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002), 13.

<sup>15</sup> H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural* (Magelang: Indonesia Tera, 2003), 282.

<sup>16</sup> Dede Rosyana, *Paradigma Pendidikan Demokrasi: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2004), 22.

<sup>17</sup> Mujtahid, *Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat*, [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), hlm.1

<sup>18</sup> Damaningtyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 161.

Sebagaimana diungkapkan Indrajati Sidi, ada empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah. *Pertama*, terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, upaya ini dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal ini mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

*Ketiga*, peningkatan relevansi pendidikan, yang mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan pada masyarakat pada level kebijakan (pengambilan keputusan) dan level operasional. *Keempat*, pemerataan pelayanan pendidikan, mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal, serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.<sup>19</sup>

Seiring dengan tuntutan otonomi daerah tersebut, perubahan paradigma pendidikan dimaksudkan untuk mengembalikan pendidikan kepada basis masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen bagi produk pendidikan selama ini seakan-akan hanya dijadikan sebagai obyek pasif yang tidak memiliki kewenangan dan kemandirian dalam merumuskan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini, lahirlah konsep pendidikan yang menekankan keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat yang disebut dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community Based Education*).

#### **E. Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) adalah sebuah model pendidikan yang mengikutsertakan masyarakat di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, maka pendidikan tersebut berakar di dalam masyarakat dan di dalam kebudayaan. Dengan demikian lembaga-lembaga pendidikan yang berfungsi untuk membudayakan nilai-nilai masyarakat dapat memenuhi fungsinya.<sup>20</sup>

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang oleh masyarakat untuk membelajarkan masyarakat sehingga mereka berdaya, dalam arti memiliki kekuatan untuk membangun dirinya sendiri yang sudah barang tentu melalui interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, konsep pendidikan berbasis masyarakat mencakup: dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.<sup>21</sup> Pendidikan berbasis masyarakat menekankan pentingnya pemahaman akan kebutuhan masyarakat dan cara

---

<sup>19</sup> Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 6.

<sup>20</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 175.

<sup>21</sup> Umberto Sihombing, *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 186.

pemecahan masalah oleh masyarakat dengan menggunakan potensi yang ada di lingkungannya.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003<sup>22</sup>, pasal 55 telah diuraikan beberapa kerangka pengembangan Pendidikan berbasis masyarakat. Poin 1 pasal 55 menyatakan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat memiliki peluang dan hak dalam membangun sistem pendidikan yang khas dengan kebutuhan lokal. Pendidikan berbasis masyarakat tersebut dapat dibentuk melalui jalur pendidikan formal maupun non formal sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator dalam turut membantu memberikan pertimbangan dan masukan bagi pelaksanaan program-program yang dikembangkan.

Pada poin 2 pasal 55 telah dijelaskan tentang kurikulum, evaluasi dan pembiayaan. Disebutkan bahwa penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Lebih lanjut terkait dengan pendanaan juga dijabarkan dalam poin 3, bahwa dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga pendidikan berbasis masyarakat juga dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah (poin 4). Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat juga memiliki hak sama dengan model pendidikan lain, khususnya terkait dengan perhatian dan partisipasi pemerintah.

Ketentuan perundang-undangan memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Dalam keikutsertaan tersebut ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. *Pertama*, status kemitraan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berkedudukan sama dalam sistem pendidikan nasional. *Kedua*, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempunyai ciri khas yang disebut dengan jatidiri satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.<sup>23</sup>

Senada dengan uraian di atas, pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu gagasan yang menempatkan orientasi penyelenggaraan

---

<sup>22</sup>Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 2 Tahun 1989 sebagai refleksi dari lahirnya reformasi dan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini lebih menekankan pada nuansa desentralisasi dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi pendidikan.

<sup>23</sup> H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 82.

pendidikan pada lingkungan kontekstual (ciri, kondisi dan kebutuhan masyarakat) sesuai dengan kelembagaan pendidikan itu berada. Orientasi pengembangan program-program pendidikan hendaknya merefleksikan ciri, sifat dan kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup>

#### F. Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat

Dalam beberapa kasus, pendidikan berbasis masyarakat sering diidentikkan dengan pendidikan luar sekolah, semata hanya merupakan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), atau hanya dipandang sebagai alternatif model pendidikan yang dibutuhkan di saat krisis, pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya adalah sebuah substansi dari kegiatan pendidikan secara keseluruhan.

Pendidikan berbasis masyarakat lebih diarahkan untuk membentuk disposisi mental dan emosional, mensosialisasikan pemaknaan, dan mengajarkan peserta didik sebagai strategi dalam menyongsong masa depan. Pendidikan berbasis masyarakat tidak sekedar menuntut adanya keterlibatan dan peran aktif masyarakat, tetapi hasil dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dituntut untuk mampu memecahkan berbagai problema masyarakat.<sup>25</sup>

Tujuan pendidikan berbasis masyarakat adalah untuk mengembangkan kualitas pendidikan yang memberikan wewenang pada masing-masing masyarakat/sekolah. Negara tetap memiliki tanggung jawab yang utama terhadap pendidikan, tetapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang akan mempengaruhi kebijakan sekolah, khususnya dalam upaya pemberdayaan siswa.<sup>26</sup>

Dengan membangun pendidikan berbasis masyarakat, diharapkan akan memberikan peluang bagi institusi pendidikan agar semakin meningkatkan peranannya, yakni dengan cara memberikan kemudahan kepada pimpinan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang ada di masyarakat, termasuk sumber daya manusia. Dengan cara demikian, antara sekolah/madrasah dan masyarakat berada pada satu visi, misi, tujuan dalam ikut serta mensukseskan program pendidikan.<sup>27</sup>

Dalam pertemuan kelompok kerja (pokja) pendidikan berbasis masyarakat<sup>28</sup> telah dirumuskan beberapa tujuan utama pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat, antar lain:

---

<sup>24</sup>Satori, *Implementasi Life Skill dalam Konteks Pendidikan di Sekolah*, 2001, www.pendidikan.go.id.

<sup>25</sup> Bagong Suyanto, "Pendidikan Berbasis Masyarakat: Prasyarat yang Dibutuhkan", *Edukasi*, Vol. I, No. 1 (2005), 11.

<sup>26</sup> Keter Petrus, *A Practitioner's Guide to School Community Based Management* (United State: Department of Education, under the Regional Education Laboratory Program), www.Goole.com. hlm. 1.

<sup>27</sup> Mujtahid, *Membangun Pendidikan*, 2.

<sup>28</sup> Hasil dari kelompok kerja Pendidikan Berbasis Masyarakat Bappenas/Bank Dunia tahun 1999 yang diketuai oleh Dr. Hafid Abbas dengan anggota: Drs. Simorangkir, M.A., Dr. Jahja Umar, Dr. Ibrahim Musa, Prof. Dr. Ishak Abdulhak, Prof. Dr. Djudju Sudjana, Drs. Nasaruddin, M.A., Drs. Sujarwo, M.Sc., Drs. Triyadi, M.Pd., Drs. Fuad Fachruddin, Drs. Amin Bakry, M.A.,

1. Membantu pemerintah dalam memobilisasi sumber daya lokal dan meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan pada semua tingkat, jenis, dan jalur pendidikan.
2. Merangsang terjadinya perubahan sikap dan persepsi tentang rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah, rasa tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kekuatan multikultural.
3. Mendukung prakarsa pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi.
4. Mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran persekolahan dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, penyediaan akses yang lebih besar, peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dasar untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
5. Membantu mengatasi putus sekolah khususnya dari pendidikan dasar.<sup>29</sup>

Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat diharapkan dapat menghasilkan beberapa capaian. *Pertama*, membantu pemerintah dalam mengerahkan sumber daya lokal dan eksternal. *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program pelatihan ketrampilan fungsional untuk anak putus sekolah. *Ketiga*, stimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat dalam hal rasa kepemilikan akan sekolah dan lembaga pendidikan lanjutan lainnya. *Keempat*, kebijakan desentralisasi pendidikan dengan upaya meningkatkan dukungan dari masyarakat. *Kelima*, dukungan terhadap masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan inovatif pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah.<sup>30</sup>

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan proses pendidikan yang tidak terlepas dari masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai basis keseluruhan kegiatan pendidikan. Semua potensi yang ada di masyarakat apabila dapat diberdayakan secara sistematis, sinergik dan simbiotik melalui suatu proses yang konseptual, dapat dijadikan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan.<sup>31</sup> Pendidikan berbasis masyarakat merupakan upaya memberikan kepercayaan kepada masyarakat lokal untuk merencanakan dan melaksanakan sistem pendidikannya sendiri sesuai dengan kebutuhan pendidikan di daerahnya.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya dirancang oleh masyarakat untuk membelajarkan

dan *External Reviewers*: Dr. Johannes Riberu, Drs. K.H. Gaffar Rachman. Pokja ini tidak dilanjutkan pada kegiatan tahap kedua karena dinilai masih perlu ada penajaman konsep pendidikan berbasis masyarakat yang dikembangkan.

<sup>29</sup> Fasli Jalal & Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 200.

<sup>30</sup> *Ibid*, 200.

<sup>31</sup> M. Surya, *Menyongsong Agenda Reformasi Pendidikan*, [www.bdg.centrin.net.id](http://www.bdg.centrin.net.id).

<sup>32</sup> H. Abbas, *Perlu Pendidikan Berbasis Masyarakat*, [www.otoda.or.id](http://www.otoda.or.id).

masyarakat sehingga mereka berdaya, dalam arti memiliki kekuatan untuk membangun dirinya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Konsep pendidikan berbasis masyarakat ini pada akhirnya merupakan sistem pendidikan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam segala aktivitasnya, termasuk di dalamnya adalah proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran dan manajemen yang dilaksanakan oleh masyarakat.

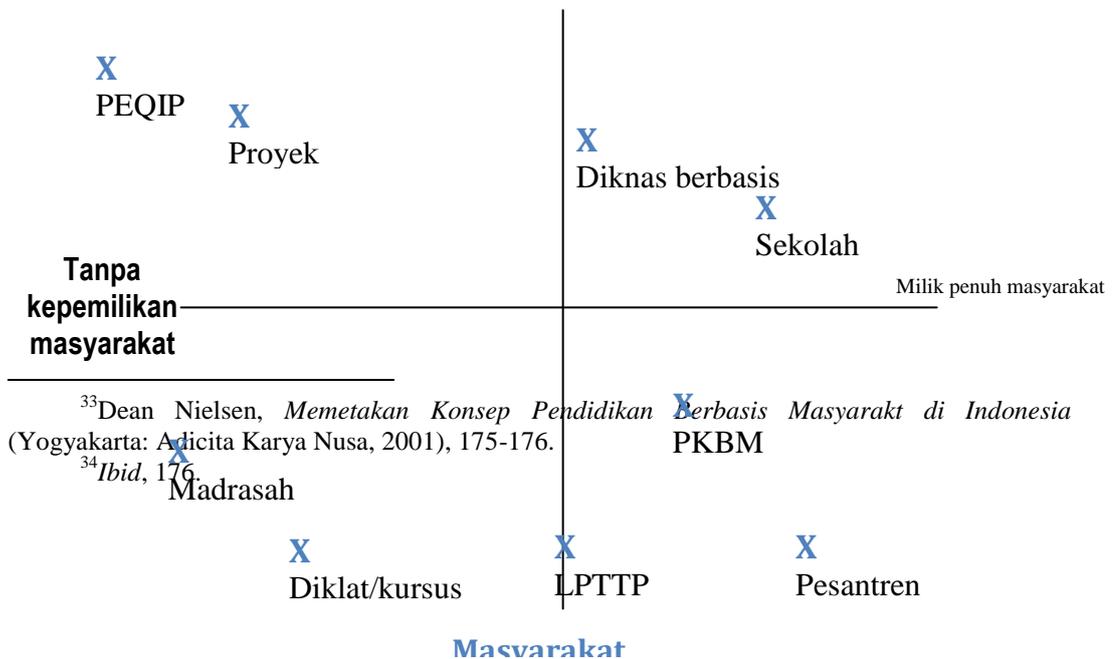
**G. Karakteristik Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Konseptualisasi pendidikan berbasis masyarakat membawa banyak persepsi dan pemaknaan dari berbagai ahli pendidikan, sehingga belum ditemukan makna umum dari terminologi pendidikan berbasis masyarakat. Pada dasarnya pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia merujuk pada beberapa karakter, antara lain:

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan.
2. Pengambilan keputusan yang berbasis sekolah/madrasah.
3. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta dan yayasan.
4. Pendidikan dan pelatihan oleh pusat pelatihan milik swasta.
5. Pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah.
6. Pusat kegiatan belajar masyarakat.
7. Pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput (*grassroot organizations*) seperti LSM dan pesantren.<sup>33</sup>

Kesemua karakteristik tersebut terkandung makna implisit tentang masyarakat, dimana istilah tersebut seringkali merujuk pada perbedaan dengan berbasis pemerintah. Basis berarti derajat kepemilikan, dengan demikian pendidikan berbasis masyarakat berarti menunjuk pada kepemilikan penuh dari masyarakat untuk menentukan tujuan, pembiayaan, kurikulum, guru, standar ujian, serta ketentuan lainnya.

Salah satu cara menetapkan karakter pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan cara memplot berbagai bentuk ke dalam dua dimensi, yaitu perbandingan dimensi pemerintah dan masyarakat, pada dimensi lain adalah derajat kepemilikan masyarakat, sebagaimana digambarkan sebagai berikut<sup>34</sup>:



<sup>33</sup>Dean Nielsen, *Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 175-176.

<sup>34</sup>*Ibid*, 176.

Gambar 2.1. Pemetaan Pendidikan Berbasis Masyarakat

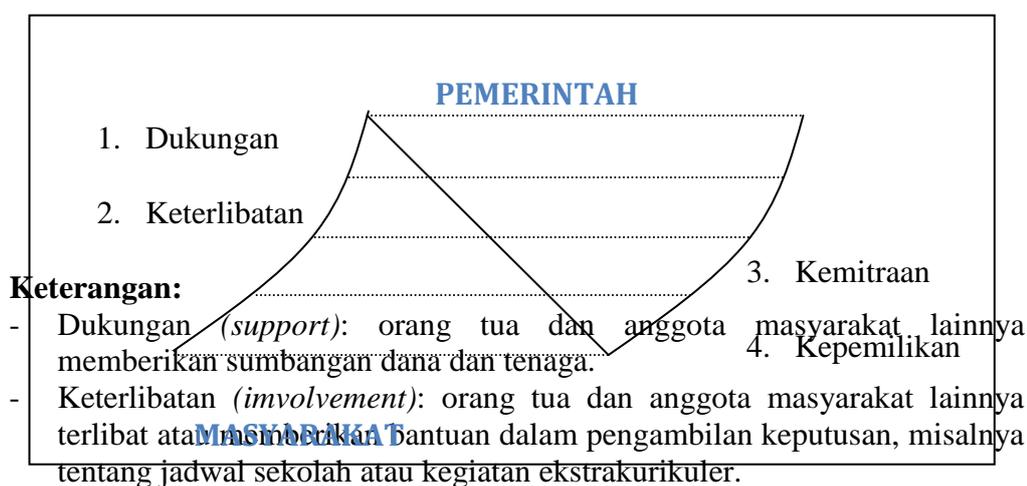
**Keterangan:**

- PEQIP : *Primary Education Quality Improvement Project* (Proyek Peningkatan MutuSD).
- PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- LPTTP : Lembaga Pendidikan Teknologi Tepat Guna.

Dari gambar di atas dapat dilihat sejauhmana tingkat kepemilikan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, semakin tinggi tingkat kepemilikan masyarakat maka semakin tinggi nilai yang dimiliki dalam pendidikan berbasis masyarakat. Sebagai contoh, dapat dijelaskan dari gambar di atas bahwa PEQIP merupakan program pendidikan yang sangat kecil memiliki keterlibatan masyarakat. Sementara pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat besar tingkat keterlibatan dan kepemilikan masyarakat.

Dengan cara ini tampak sejauhmana suatu program atau bentuk pendidikan benar-benar berbasis masyarakat. Merujuk pada gambar di atas dapat dikatakan bahwa satu-satunya model pendidikan yang sepenuhnya berbasis masyarakat adalah pondok pesantren, yang memiliki kurikulum sendiri, mengusahakan pendanaan sendiri, dan melayani kebutuhan masyarakat.

Cara lain untuk memetakan karakter pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan memplot derajat pengendalian masyarakat terhadap program pendidikan tersebut.<sup>35</sup> Cara pemetaan karakter pendidikan berbasis masyarakat ini digambarkan oleh Dean Nielsen sebagai berikut:



Gambar 2.2. Tingkat Pengendalian Masyarakat terhadap Pendidikan

dalam menentukan hal-hal yang berkenaan dengan, misalnya tujuan program, alokasi dana, dan ketenagaan.

- Kepemilikan penuh (*full ownership*): para anggota masyarakat mengendalikan semua keputusan tentang program lembaga pendidikan.

<sup>35</sup>*Ibid*, 178.

Dari gambar di atas dapat ditelaah bahwa pendidikan yang benar-benar berbasis masyarakat adalah lembaga pendidikan yang memiliki tingkat kepemilikan masyarakat yang sangat besar, sebaliknya memiliki dukungan dan intervensi pemerintah yang sangat kecil, salah satu contohnya adalah lembaga pendidikan pesantren.

Terkait dengan penjabaran di atas, maka di satu sisi pemerintah juga memiliki peran penting dalam menopang penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20. Tahun 2003 juga telah disebutkan secara eksplisit bahwa pemerintah dapat membantu dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, seperti memberikan dukungan sarana atau pendanaan guna menunjang pelaksanaan program.

Beberapa peran yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu menata pelaksanaan program pendidikan berbasis masyarakat antara lain:

1. Peran sebagai pelayan masyarakat
2. Peran sebagai fasilitator
3. Peran sebagai pendamping
4. Peran sebagai mitra
5. Peran sebagai penyandang dana.<sup>36</sup>

Memang pada dasarnya pengembangan konsep pendidikan berbasis masyarakat tidak bisa dilepaskan dari mekanisme penyerapan pendanaan dalam menopang program-program pendidikan yang dijalankan. Selain pemerintah membantu dalam pembiayaan program, namun secara nyata masyarakatlah yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber-sumber pendanaan.

Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi ketika menerapkan pendidikan berbasis masyarakat melibatkan secara luas partisipasi *stakeholders* pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi secara transparan pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat.

#### **H. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Pendidikan dan masyarakat merupakan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Melalui pendidikan, manusia dapat lepas dari belenggu kebodohan, di sisi lain baik-buruk kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Menurut Durkheim, sebagaimana dikutip Spence Boocock dalam bukunya *Sociology of Education*:

Praktek pendidikan bukanlah merupakan fenomena yang terpisah dengan pranata lainnya, malah lagi bagi masyarakat bersangkutan, kesemua bidang atau peranannya bernaung di bawah satu sistem yang sama. Itulah sistem pendidikan yang sesuai

---

<sup>36</sup> Umberto Sihombing, *Konsep dan Pengembangan*, 190-191.

diterapkan kini dan di sini. Setiap masyarakat memiliki sistem moral, agama, ekonominya sendiri, dan lain sebagainya...<sup>37</sup>

Pendidikan menurut Durkheim merupakan kreasi sosial, dalam arti sebagai sarana yang digunakan masyarakat guna kelangsungan hidupnya dengan mensosialisasikan anak (peserta didik) menurut citra masyarakat itu sendiri. Komponen tersebut secara intern ada kaitannya, sehingga sistem pendidikan tertentu memiliki keutuhan dan konsistensi, dan secara ekstern saling ada hubungannya, sehingga sistem pendidikan tersebut mencerminkan nilai moral dan intelektual suatu masyarakat.<sup>38</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, sementara tak satupun dari sistem kemasyarakatan yang bebas dari norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Demikian halnya dengan lembaga pendidikan, ia tidak bisa dilepaskan dari partisipasi termasuk kontrol masyarakat.<sup>39</sup>

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan usaha pemberdayaan (*empowering*) masyarakat dalam pendidikan. Pemberdayaan ini melibatkan masyarakat dalam seluruh aktivitas pendidikan. Proses pemberdayaan itu sendiri dapat diartikan sebagai penanaman, penyuntikan dan atau peningkatan daya atau power sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.<sup>40</sup> Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pendidikan menjadi tolok ukur utama dalam mewujudkan tujuan pendidikan berbasis masyarakat.

Lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Lembaga pendidikan ada di masyarakat, hidup bersama-sama dengan warga masyarakat. Antara masyarakat dengan lembaga pendidikan saling membutuhkan, masyarakat membutuhkan pendidikan agar para siswa dan para remaja dibina di sekolah, sebaliknya sekolah membutuhkan masyarakat agar membantu kelancaran proses belajar di sekolah dengan memberikan berbagai macam fasilitas.<sup>41</sup> Antara lembaga pendidikan dengan masyarakat terjadi hubungan timbal balik (*feed back*) yang saling melengkapi, sehingga tujuan yang dirumuskan bersama dapat tercapai secara baik.

Peran serta masyarakat terhadap pengembangan konsep pendidikan berbasis masyarakat dapat dilihat melalui beberapa kriteria, antara lain:

1. Peran serta masyarakat tidak hanya berwujud pemberian bantuan uang atau fisik, tetapi juga hal-hal akademik.
2. Kewajiban sekolah (disertai *monitoring* dan *accountability*) yang tinggi terhadap pemerintah maupun masyarakat.

---

<sup>37</sup> Sanapiah Fasial, *Sosiologi Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 242

<sup>38</sup> *Ibid*, 246.

<sup>39</sup> Syamsul Huda, "Progresivisme: Tentang Sekolah dan Masyarakat", *Empirisme*, Vol. I, No. 8 (2002), 71.

<sup>40</sup> Hamidjojo, *Konsep Dasar Pemberdayaan Menuju Masyarakat Sadar Pendidikan*. Seminar Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. 19 Mei 2001

<sup>41</sup> Made Pidarta, *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 169.

3. Memberi kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk partisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan.
4. Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan tujuan pendidikan, bukan hanya untuk kepentingan administrasi atau birokrasi.
5. Program pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik sekarang maupun mendatang, berorientasi pada peningkatan mutu bukan untuk kepentingan birokrasi.
6. Laporan pertanggungjawaban terbuka untuk seluruh pihak yang berkepentingan termasuk orang tua dan masyarakat.<sup>42</sup>

Keterlibatan masyarakat tidak hanya sekedar dan sebatas pemberian biaya sekolah, namun sebaliknya peran aktif masyarakat dalam segala keputusan dan kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Peran aktif masyarakat dalam pendidikan merupakan realisasi dari otonomi daerah melalui pemerintah daerah untuk menjadikan masyarakat sebagai basis pendidikan sesuai dengan potensi daerahnya.

Masyarakat memiliki peran besar dalam ikut menciptakan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Peran tersebut antara lain menciptakan suasana yang menunjang pelaksanaan pendidikan, misalnya membantu pengadaan biaya, tenaga kependidikan, maupun sarana prasarana.<sup>43</sup> Dengan demikian masyarakat dapat memberikan dukungan baik material, moral maupun kultural dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang lebih demokratis.

Partisipasi masyarakat dapat menjadi alat dan tujuan, tetapi dapat pula berarti keduanya, keterlibatan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan upaya, memperbesar kapasitas atau memperluas hak dan kewajiban mereka. Ketika masyarakat terlibat, seharusnya mereka memberikan waktu, uang, gagasan, kepercayaan, dan kemauan, dan ketika harapan mereka meningkat maka upaya tindak lanjut perlu dilakukan agar partisipasi masyarakat berkelanjutan.<sup>44</sup> Partisipasi mengandung arti kesadaran untuk melakukan sebuah upaya secara bersama sesuai tujuan yang telah ditentukan bersama, sehingga ketika masyarakat turut berpartisipasi dalam program pendidikan maka mereka akan memiliki tanggung jawab untuk berusaha secara optimal mewujudkan suatu tujuan.

Pendidikan akan berjalan dengan baik, benar dan dinamis apabila hidup dalam masyarakat yang berbudaya akademik tinggi dan peduli dengan pendidikan. Masyarakat juga dapat menjadi media kontrol atas mutu pendidikan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, melalui penilaian oleh *stakeholders*: murid, orang tua, tokoh-tokoh

---

<sup>42</sup>AS. Haris, *Pengembangan Sekolah Melalui Partisipasi Masyarakat: Sebuah Kajian Operasional Tingkat Sekolah*. Seminar Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. 19 Mei 2001.

<sup>43</sup>Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 59.

<sup>44</sup>Fasli Jalal & Dedi Supriasi, *Reformasi Pendidikan*, 202

masyarakat, ilmuwan, agamawan, industrialis, dan para pengguna jasa pendidikan terkait lainnya.<sup>45</sup>

### I. Pesantren sebagai Bentuk Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia. Dalam sudut pandang historis, lembaga pendidikan pesantren ini sudah ada sebelum Islam datang ke Indonesia. Oleh karena itu, namanya berasal dari dua kata bahasa asing yang berbeda. Pondok berasal dari bahasa Arab *funduq*, yang berarti tempat penginapan atau asrama. Sedangkan pesantren dengan awalan pe- dan akhiran -an, berasal dari kata santri, bahasa Tamil yang berarti para penuntut ilmu atau diartikan juga guru mengaji.<sup>46</sup>

Dalam sejarah nasional, pondok pesantren bukan hanya lembaga yang identik dengan keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian (*indegenous*), sebab lembaga yang serupa dengan pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak kekuasaan Hindu-Budha. Sehingga Islam tinggal meneruskan dan meng-Islam-kan lembaga pendidikan yang sudah ada. Dengan demikian pesantren sebenarnya tidak hanya identik dengan tempat pembelajaran ilmu agama Islam semata, namun juga ada unsur warisan budaya masyarakat.<sup>47</sup>

Dari makna yang terkandung, pondok pesantren selalu mempertahankan unsur aslinya, yaitu: adanya pondok, masjid, pengajian kitab klasik (kitab kuning), santri dan kiai atau guru. Dari kelima unsur ini selalu ada dalam kehidupan pondok pesantren. Semua sebagai satu sistem yang selalu berinteraksi menjadi satu arah tujuan pendidikan Islam yang dijalankan melalui pesantren. Pesantren memiliki pengertian dan konotasi kemasyarakatan, bahkan suatu kesatuan ekonomis dan mungkin pula politis, di samping sebagai suatu wujud masyarakat pendidikan dengan membawa ciri dan nuansa keagamaan.

Pada awal perkembangannya, pesantren memiliki dua fungsi yang sangat kental, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang melaksanakan proses pembelajaran<sup>48</sup> bagi santri, dan kedua sebagai lembaga penyiaran agama. Fungsi utama ini selalu dijaga dan dilestarikan, bahkan dari pengaruh

---

<sup>45</sup>Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2003), 168

<sup>46</sup>Mohammad Daud Ali & Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 145.

<sup>47</sup>Badaruddin, "Kepribadian Kiai dalam Pondok Pesantren", *Wacana*, Vol. V, No. 1. (Maret 2005), 64

<sup>48</sup>Poses pembelajaran di pesantren dikenal ada dua sistem, yaitu: sistem *sorogan* dan sistem *bandongan* atau seringkali juga disebut sistem *weton*. Sistem *sorogan* adalah sistem belajar seorang santri yang *menyorog*-kan (menyodorkan) kitab yang akan dikajikan kepada kiai, memohon agar dibimbing mempelajari kitab tersebut. Dengan sistem ini, terjadilah proses belajar mengajar yang bersifat personal, karena santri itu dilayani secara pribadi oleh kiai, bukan bersama-sama dengan yang lain. Sementara sistem *bandongan* atau *weton* adalah cara lain proses belajar mengajar di pesantren. Dalam sistem ini, kelompok murid yang terdiri dari 5 sampai 500 orang, mendengarkan seorang guru membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan seringkali mengulas buku-buku Islam yang ditulis dalam bahasa arab. Kelompok kelas sistem *bandongan* ini disebut *halaqah*: para santri duduk melingkar berjajar bersama di bawah bimbingan seorang guru.

modernisasi. Pesantren memiliki wilayah sosial yang mengandung daya resistensi terhadap pengaruh buruk modernisasi.

Sebagai sebuah institusi pendidikan, pesantren telah berkembang sedemikian rupa mengikuti arus perkembangan sosial, politik dan budaya di sekelilingnya. Di tengah perubahan sosial yang terus menggelinding, pesantren memainkan peran lentur dengan tetap mengacu pada pola lama yang memang masih harus dipertahankan dan di satu sisi mengadopsi berbagai perubahan yang memang diperlukan sebagai jawaban terhadap tuntutan perubahan yang terus terjadi.<sup>49</sup>

Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar. Pesantren menggunakan sistem asrama, dimana santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang kiai dengan ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal.<sup>50</sup> Pesantren lebih cenderung pada pola pendidikan tradisional yang tumbuh di kalangan masyarakat, pada umumnya tetap mempertahankan kurikulumnya secara mandiri.<sup>51</sup>

Dalam menjalankan aktivitasnya, pola interaksi kiai, masyarakat, dan pesantren berpijak pada sistem kebudayaan agraris, sebab kiai pada umumnya berdomisili di pedesaan, Namun dengan kedalaman ilmu yang ia miliki, kiai sangat peka terhadap perkembangan suatu masyarakat, sehingga tidak tampak kesulitan untuk menyesuaikan dengan budaya masyarakat agraris. Ia memahami bahwa dalam sistem budaya tersebut terkandung nilai-nilai yang sangat luhur dalam hubungan kemanusiaan, baik dengan Tuhan, alam semesta, maupun lingkungan.<sup>52</sup>

Substansi pendidikan yang ditanamkan di pesantren adalah pendidikan watak dan pendidikan keagamaan. Sebagai komunitas belajar keagamaan, pesantren mempunyai hubungan sangat erat dengan lingkungan sekitarnya. Dalam masyarakat pedesaan tradisional, kehidupan keagamaan tersebut merupakan bagian yang menyatu dengan kenyataan hidup masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan pesantren, kiai mempunyai kedudukan sangat penting dalam menentukan kebijakan.

Dari segi karakter, selama ini pesantren dikategorikan menjadi tradisional (*salafiyah*) dan modern (*khalafiyah*). Kategori pertama diasosiasikan dengan pengajaran kitab kuning, sedangkan yang kedua dicirikan oleh adaptasi sistem pendidikan modern.<sup>53</sup> Kategorisasi ini bukan

---

<sup>49</sup> Nur Syam, *Pesantren Di Tengah Pemberdayaan Masyarakat pada Era Otonomi Daerah* (Surabaya: Yayasan Tri Guna Bhakti, 2001), 83.

<sup>50</sup> Djamaluddin & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: CV. Pustaka setia, 1998), 99

<sup>51</sup> Zuhairini.dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), 123.

<sup>52</sup> Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 256.

<sup>53</sup> Departemen Pertanian dan PPIM IAIN Jakarta, "Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat", *PERTA (Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam)*, Vol. 11, No. 1 (September 1998), 32.

hanya dianggap mapan, bahkan seringkali dijadikan standard untuk melihat keberadaan pesantren.

Sudut pandang dalam menilai pesantren pada dasarnya dibedakan pada dua hal, yakni pesantren sebagai penyelenggara pendidikan, di sisi lain pesantren sebagai lembaga pendidikan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan merupakan pendidikan non-formal dan luar sekolah. Sementara pesantren sebagai penyelenggara pendidikan itulah yang kemudian mendirikan sekolah atau madrasah atau diniyah. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah dan luar sekolah dapat dilakukan secara terpadu.<sup>54</sup>

Dalam perkembangan saat ini, telah banyak pesantren menyelenggarakan jalur pendidikan formal sebagai pengembangan pendidikan umum. Pendidikan formal tersebut dapat berupa madrasah, sekolah-sekolah Islam, bahkan perguruan tinggi yang berada dalam lingkup (kompleks) pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya sebagai pusat penyebaran agama Islam, tetapi juga sebagai pusat pengembangan keilmuan dan intelektual masyarakat.

Meskipun beberapa jalur dan jenjang pendidikan telah dibuka oleh sistem pendidikan pesantren, namun secara mendasar hal tersebut tidak mengurangi kekhasan pesantren sebagai wujud pendidikan berbasis masyarakat. Pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan Islam dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena meskipun beberapa pesantren membuka jalur pendidikan formal, namun seluruh kebijakan arah pengembangannya tidak terlepas dari keterlibatan atau visi yayasan/pondok pesantren.

Ada beberapa prinsip yang berkembang di lingkungan pesantren sebagai ciri utama keberadaan pesantren, yaitu:

1. Memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam.
2. Memiliki kebebasan yang dipimpin.
3. Berkemampuan mengatur diri sendiri.
4. Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi.
5. Menghormati orang tua dan guru.
6. Cinta kepada ilmu.
7. Mandiri.
8. Kesederhanaan.<sup>55</sup>

Dari beberapa ciri pesantren tersebut dapat dipahami bahwa pesantren memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengatur dirinya sendiri. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang kemunculan pesantren yang benar-benar lahir dari masyarakat, sehingga ada rasa kepemilikan bersama untuk turut mengembangkan pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Sebagaimana dikatakan Dean Nielsen bahwa satu-satunya pendidikan yang sepenuhnya berbasis masyarakat adalah

---

<sup>54</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritual Pendidikan, Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 182.

<sup>55</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 201-202.

pesantren, yang memiliki kurikulum, pendanaan, dan sistem pelayanan masyarakat sendiri.

Sebagai salah satu penyelenggara dan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, pesantren memiliki peran sosial yang cukup tinggi. Keterlibatan pesantren dalam melaksanakan transformasi sosial dapat dikatakan muncul bersamaan dengan kehadiran pesantren itu sendiri. Karena adanya *committed* terhadap misi yang diembannya, pesantren hadir untuk dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat pesantren pada umumnya tumbuh dari bawah, berpijak pada realitas konkrit masyarakat.<sup>56</sup>

Dunia pesantren merupakan perwujudan masyarakat belajar (*learning society*) yang merupakan sumber informasi bagi masyarakat sekitarnya. Informasi ini tidak terbatas pada masalah agama, tetapi juga meliputi masalah-masalah ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, bahkan juga masalah tehnik. Dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, pesantren selain menjadi lembaga pendidikan dan penyiaran agama, sekaligus merupakan pusat informasi pedesaan, tempat pelatihan, balai musyawarah dan pusat pembangunan lingkungan. Proses interaksi untuk selalu terbuka menerima masukan dari masyarakat ini merupakan ciri yang selalu melekat pada karakter pesantren.

Oleh karena pesantren tumbuh dari bawah, pada saat yang sama pesantren menjadi suatu lembaga yang relatif mandiri, bersifat otonom, dan berbasis masyarakat. Hal ini berimplikasi positif pada minimnya ketergantungan pesantren kepada pihak atau lembaga lain, sehingga pesantren memiliki kebebasan dan otoritas penuh dalam menentukan sendiri segala kebijakannya. Karakter dasar ini pada gilirannya mengantarkan pesantren kepada ketahanan yang cukup tegar dan kukuh dalam menghadapi terpaan segala tantangan sepanjang perjalanan sejarah yang dilaluinya.<sup>57</sup>

Pesantren adalah suatu sistem kehidupan yang lahir di dalam kondisi masyarakat tertentu. Oleh karena itu, sebenarnya pesantren dikelola oleh masyarakat yang memilikinya. Meskipun di dalam perkembangannya pengelolaan pesantren banyak ditentukan oleh para kiai sebagai pemiliknya, namun tidak dapat disangkal bahwa kehidupan pesantren telah ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat. Jika dewasa ini kita bicara mengenai inovasi pendidikan nasional untuk melahirkan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat maka pesantren merupakan model asli dari sistem pendidikan tersebut.<sup>58</sup>

Kemandirian dan otonomi yang dimiliki pesantren itulah sebagai karakter pengembangan pendidikan berbasis masyarakat. Pesantren terus berproses mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosio-kultural yang mengitarinya. Perubahan dan dinamika pesantren sangat dipengaruhi oleh sejauhmana masyarakat berperan serta dalam menata dan mengevaluasi program-program di pesantren. Tanpa memiliki basis sosial yang kuat, maka

---

<sup>56</sup> Abd. A'la, *Perspektif Baru Pesantren dan Pengembangan Masyarakat* (Surabaya: Yayasan Tri Guna Bhakti, 2001), 51.

<sup>57</sup> *Ibid*, 53.

<sup>58</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, 152.

pesantren akan sulit mengembangkan dirinya, sebab jati diri sebuah pesantren dapat dikatakan sebagai refleksi dari jati diri suatu masyarakat.

Pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan berbasis masyarakat maka ia lahir dan berkembang dari masyarakat. Dalam konteks ini perkembangan pesantren sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan lingkungannya. Di sisi lain, karena relasi masyarakat dengan pesantren adalah saling melengkapi satu sama lain, maka pesantren dituntut mampu memberikan peran dalam upaya transformasi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Paling tidak ada beberapa peran pesantren dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. *Pertama*, penyiapan SDM yang memiliki kualitas unggul, yaitu memiliki pengetahuan keduniaan yang memadai, kualitas ketaqwaan yang relevan dan sikap perilaku mandiri bagi setiap individu. *Kedua*, pesantren merupakan aset masyarakat yang dapat mengakses perubahan secara mandiri. *Ketiga*, output pesantren yang mandiri kemandirian kiranya juga cukup relevan bagi proses pemberdayaan masyarakat, terutama di era desentralisasi saat ini.<sup>59</sup>

### **BAB III. PENUTUP**

#### ***Kesimpulan***

Dari penyajian dan analisis data, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip dalam penerapan pelaksanaan *community based education* (pendidikan berbasis masyarakat) pada dasarnya telah dimiliki dan dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah PP Mambaus Sholihin, sebelum konsep itu sendiri dimunculkan terutama di era desentralisasi pendidikan. Hal ini mengingat Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin berada di lingkungan pondok pesantren, dimana latar belakang kemunculannya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat serta dikembangkan untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada konsep pendidikan berbasis masyarakat serta Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin juga terus berupaya melaksanakan konsep tersebut dalam rangka meningkatkan kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Madrasah Aliyah PP Mambaus Sholihin telah mengimplementasikan konsep pendidikan berbasis masyarakat melalui beberapa program kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin adalah : Aspirasi Masyarakat dalam Pendirian Madrasah, Pola Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Masyarakat sebagai Pemantau Sistem Pendidikan.

---

<sup>59</sup> Nur Syam, *Pesantren Di Tengah Pemberdayaan Masyarakat*, 100-101

Sedangkan faktor kendala dalam pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin lebih disebabkan pada : Kultur pesantren yang masih dominan, pola manajemen yang harus mengikuti pola pesantren, kualitas sumber daya manusia yang lemah, partisipasi masyarakat kurang, dan keterbatasan informasi.

Kelemahan atau kendala tersebut lebih bersifat internal. Hingga saat ini kesadaran para personalia madrasah dalam menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat masih tergolong kecil, begitu juga dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat rendah.

#### **J. Saran-saran**

Untuk terus meningkatkan upaya penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat di Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin secara lebih baik, ada beberapa saran masukan yang kiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan:

1. Perlu kesamaan pandangan antara pengelola Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin dengan pihak yayasan Pondok Pesantren dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menunjang program pendidikan.
2. Perlu meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin dengan masyarakat, terutama optimalisasi peran komite sekolah (Madrasah).
3. Perlu keterbukaan sistem yang dapat menerima tanggapan, kritik maupun saran dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan berbasis masyarakat.
4. Perlu terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme.
5. Perlu untuk lebih mengembangkan program-program kerja madrasah yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

### **DAFTAR KAJIAN KEPUSTAKAAN.**

A'la, Abd. 2001. *Perspektif Baru Pesantren dan Pengembangan Masyarakat*, Surabaya: Yayasan Tri Guna Bhakti.

Abbas, H. *Perlu Pendidikan Berbasis Masyarakat*, [www.otoda.or.id](http://www.otoda.or.id).

Ali, Mohammad Daud & Daud, Habibah. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Garafindo Persada.

Amri, 1997. Kata Pengantar dalam James P. Spredley, *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

- Badaruddin, 2005. Kepribadian Kiai dalam Pondok Pesantren, Wacana, V (1): 64.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Damaningtyas, 1999. *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pertanian & PPIM IAIN Jakarta. 1998. Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, PERTA, 11 (1): 32.
- Depdiknas-Dirjendikdasmen. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* buku I, Konsep dan Pelaksanaan, Jakarta: Dirjen-Dikdasmen.
- Djamaluddin & Aly, Abdullah. 1998. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Duhou, Ibtisam Abu. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*, ter. Noryamin Aini & Suparto, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Faizin, Mohammad. 2003. *Penerapan Konsep School Based Management MIN Unggulan/Model; Studi Kasus MIN Model Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan*, Surabaya; Karya Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya .
- Fajar, A. Malik. 1999. *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia.
- Fasial, Sanapiah. 1980. *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Hamidjojo, 2001. *Konsep Dasar Pemberdayaan Menuju Masyarakat Sadar Pendidikan*. Seminar Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Haris, AS. 2001. *Pengembangan Sekolah Melalui Partisipasi Masyarakat: Sebuah Kajian Operasional Tingkat Sekolah*. Seminar Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Huda, Syamsul. 2002. Progresivisme: Tentang Sekolah dan Masyarakat, Empirisme, I (8): 71.
- Ihsan, Fuad. 1997. *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Jalal, Fasli & Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Malik, Gulam Farid. 2000. *Pedoman Manajemen Madrasah*, Yogyakarta: Kerjasama Basic Education Project (BEP) Depag, ADB Lou Number 1442 INO dengan Forum Kajian Budaya dan Agama (FKBA).

- Mastuhu, 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos.
- Mastuhu, 2003. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safira Insania Press.
- Mujtahid, *Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat*, [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id).
- Mulkhan, Abdul Munir. 2002. *Nalar Spiritual Pendidikan, Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mulyasa, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1990. *Asas-asas Kurikulum*, Bandung: Jemars.
- Nasution, S. 1997. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tronsto.
- Nielsen, Dean. 2001. *Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Petrus, Keter. *A Practitioner's Guide to School Community Based Management* (UnitedState: Department of Education, under the Regional Education Laboratory Program), [www. Goole.com](http://www.Goole.com).
- Pidarta, Made. 1997. *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Riyanto, Yatim. 2003. *Penelitian Kualitatif*, Surabaya: SIC.
- Rosyana, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokrasi: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Satori, 2001. *Implementasi Life Skill dalam Konteks Pendidikan di Sekolah*, [www.pendidikan.go.id](http://www.pendidikan.go.id).
- Sihombing, Umberto. 2001. *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Stense, Anselm and Carvin, Juliet. 1990. *Basic of Qualitative Research; Grounded Theory Procedure an Techniques*, Toronto: Sage Production.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2000. *Pengantar Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Surya, M. *Menyongsong Agenda Reformasi Pendidikan*, [www.bdg.centrin.net.id](http://www.bdg.centrin.net.id).

- Suyanto, Bagong. 2005. Pendidikan Berbasis Masyarakat: Prasyarat yang Dibutuhkan, *Edukasi*, I (1): 11.
- Syam, Nur. 2001. *Pesantren Di Tengah Pemberdayaan Masyarakat pada Era Otonomi Daerah*, Surabaya: Yayasan Tri Guna Bhakti.
- Tafsir, Ahmad. 1994. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thoriqoh, Mustofa. 2000. *Ta'lim Qowaidi al-Nahwi wa al-Sorfi Nahwa al-Lughoti al-Arabiyyah fi al-Madrasah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik*, Gresik: Skripsi STIT Raden Santri.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesia Tera.
- Yin, Robert K. 1994. *Case Study Research*, London; Sage Production.
- Zuhairini. Dkk. 1996. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.